

BAB I

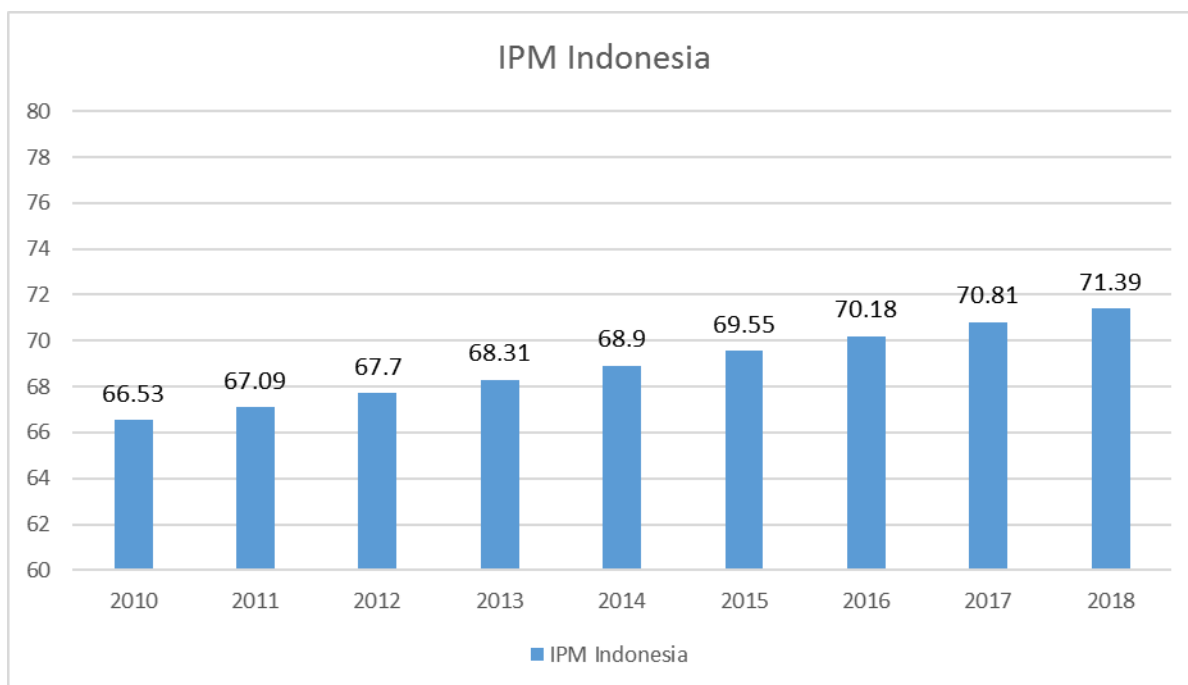
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan aset suatu bangsa berperan sangat penting untuk membangun suatu negara. Dikatakan penting karena sebagai sumberdaya manusia, mereka adalah pelaku utama yang dapat menggerakkan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan dalam segala bidang yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terkandung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, pada hakikatnya pembangunan nasional merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia serta perdamaian abadi. Dengan demikian pembangunan memiliki arti sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan manusia merupakan isu yang sangat penting. Sebagai modal utama dalam pembangunan, kualitas sumberdaya manusia menjadi jawaban atas kemampuan manusia untuk mengelola sekaligus memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal (bulelengkab.go.id). Indikator Pembangunan Manusia atau IPM disebut sebagai salah satu instrumen dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara yang pada akhirnya juga digunakan untuk mengklasifikasi negara dapat dikatakan sebagai negara maju, berkembang atau terbelakang (Ayunanda Melliana, 2013). Selain itu IPM juga dianggap sebagai sebuah alat ukur yang dapat menggambarkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data dari UNDP atau United Nations Development yang merupakan bagian dari jaringan badan program pembangunan PBB Programme, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia negara Indonesia menduduki posisi ke 6 di Asia Tenggara Pada tahun 2018 dengan skor 0,707 berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan di atas Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, dan. Masuknya Indonesia dalam Peringkat tersebut mencerminkan komitmen nasional yang kuat untuk membangun manusia dari segi

Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat namun juga masih perlu untuk mengantisipasi ketimpangan pada masa yang akan datang. Indikator Pembangunan Manusia ditentukan oleh tiga komponen utama yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Terdapat dua aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam meraih kemajuan pembangunan manusia yaitu status pencapaian dan kecepatan. Indikator Pembangunan Manusia Indonesia setiap tahun terus menunjukkan peningkatannya. Sebagaimana yang dipaparkan pada tabel sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018 (%)

Dari gambar diatas terlihat bahwa IPM Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2018 terus terjadi peningkatan dari rendah menuju tinggi. Dimana pada tahun 2010 sekitar 66,53%, pada tahun 2011 sekitar 67,09%, pada tahun 2012 sekitar 67,70%, pada tahun 2013 yakni sekitar 68,31%, pada tahun 2014 sebesar 68,90%, tahun 2015 sebesar 69,55%, pada tahun 2016, pada sekitar 70,18%, tahun 2017 sebesar 70,81%, dan tahun 2018 sekitar 71,39%. Namun jika dilihat dari beberapa wilayah provinsi di Indonesia, persebaran presentase IPM masih belum merata dan masih terdapat ketimpangan

pembangunan antar daerah. Hal tersebut tercermin dalam data IPM Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018 yang dipublikasikan oleh BPS sebagai berikut :

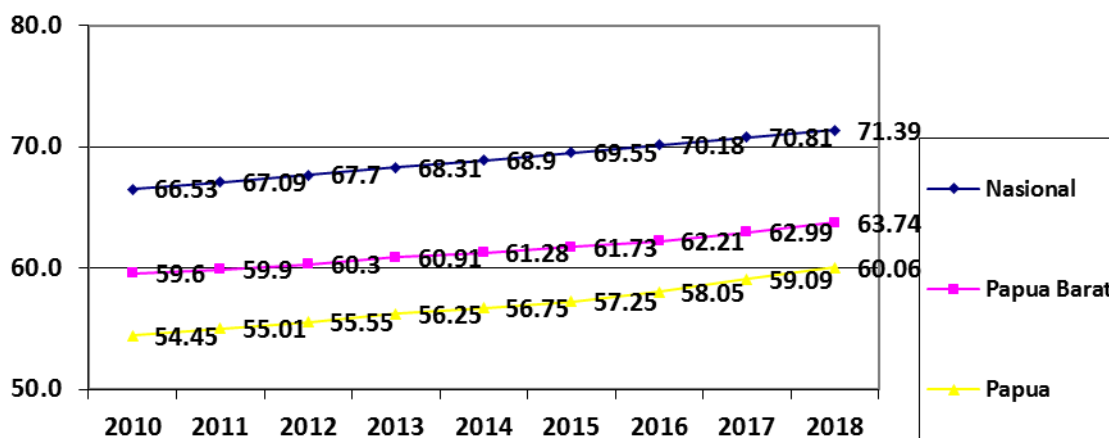
Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2018 (%)

PROVINSI	IPM (%)
DKI JAKARTA	80,47
D.I YOGYAKARTA	79,53
KALIMANTAN TIMUR	75,83
KEPULAUAN RIAU	74,84
BALI	74,77
RIAU	72,44
SULAWESI UTARA	72,20
BANTEN	71,95
SUMATERA BARAT	71,73
JAWA BARAT	71,30
ACEH	71,19
SUMATERA UTARA	71,18
JAWA TENGAH	71,12
SULAWESI SELATAN	70,90
JAWA TIMUR	70,77
KEP. BANGKA BELITUNG	70,67
JAMBI	70,65
BENGKULU	70,64
SULAWESI TENGGARA	70,61
KALIMANTAN UTARA	70,56
KALIMANTAN TENGAH	70,42
KALIMANTAN SELATAN	70,17
SUMATERA SELATAN	69,39
LAMPUNG	69,02
SULAWESI TENGAH	68,88
MALUKU	68,87
MALUKU UTARA	67,76
GORONTALO	67,71
NUSA TENGGARA BARAT	67,30
KALIMANTAN BARAT	66,98
SULAWESI BARAT	65,10
NUSA TENGGARA TIMUR	64,39
PAPUA BARAT	63,74
PAPUA	60,06

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menunjukkan bahwa status Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-provinsi di Indonesia sudah tidak terdapat lagi yang berstatus rendah. Apabila nilai IPM per provinsi tersebut dideskripsikan, maka sebanyak 12 provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusianya yang berstatus sedang, antara lain: Maluku, Sumatera Selatan, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Kemudian sebanyak 21 provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusianya berstatus tinggi, antara lain: D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kep Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Sementara satu-satunya provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusianya masuk dalam kategori sangat tinggi ialah DKI Jakarta pada tahun 2018. Provinsi Papua mendapat rangking terendah diantara provinsi lainnya dengan nilai 60,06% pada tahun 2018 menurut Badan pusat Statistik Indonesia. Meskipun demikian, dapat dikatakan lebih baik karena pada tahun sebelumnya pencapaian IPM di Provinsi Papua tersebut masih dibawah 60,06% atau bisa dikatakan berstatus rendah. Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat dimana daerah hasil pemekaran dari Provinsi Papua itu sendiri masih kalah dari segi pencapaian nilai karena memiliki nilai IPM yang lebih besar daripada provinsi induknya (Provinsi Papua) yaitu sebesar 63, 74%.



Sumber: BPK RI, diolah

Gambar 1.2 Perbandingan IPM Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Nasional (dalam %)

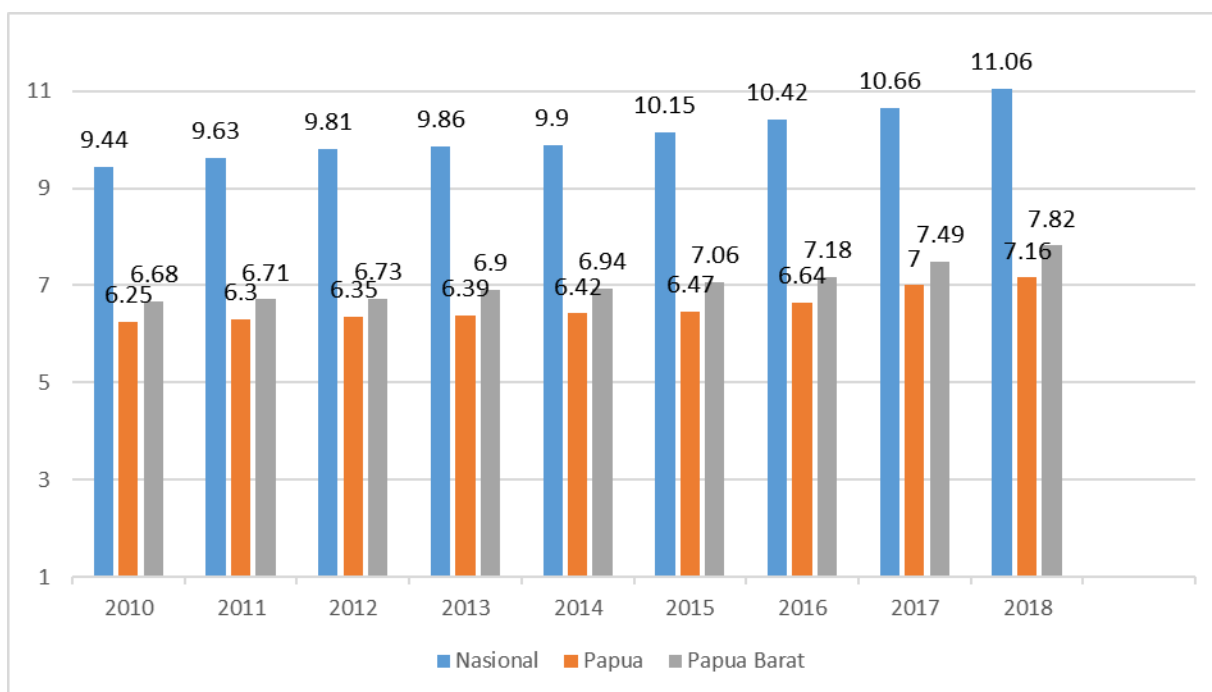
Berdasarkan gambar di atas, IPM Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mulai tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Provinsi Papua pada tahun 2010 sebesar 54,4 dan pada tahun 2018 sebesar 60,06, artinya terdapat peningkatan sebesar 5,66 dari tahun 2010 hingga tahun 2018 dan Provinsi Papua Barat tahun 2010 sebesar 59,60 dan pada tahun 2018 sebesar 63,74, artinya terdapat peningkatan sebesar 4.14 dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Selain itu IPM pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut didorong oleh kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Walaupun demikian secara agregat IPM Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih lebih rendah dari rata-rata IPM nasional dan merupakan yang terendah dibandingkan Provinsi lainnya. Analisis atas IPM tingkat kabupaten/kota menemukan kesenjangan capaian indikator IPM yang sangat mencolok. Beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki IPM yang sangat rendah dibanding IPM nasional. Peningkatan presentasi IPM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat belum dapat mengejar ketertinggalan pencapaian IPM provinsi lainnya. Pada tahun 2010, peringkat Provinsi Papua berada di peringkat terakhir, sedangkan Provinsi Papua Barat berada di peringkat terakhir kedua setelah Provinsi Papua. Pada tahun 2018 pun masih

tetap sama, dimana Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berada di peringkat terbawah. Walaupun presentase IPM Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan, tetapi selalu mendapat peringkat terendah dibanding provinsi lainnya.

Pemerintah juga berperan dalam mengembangkan kemajuan sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan melakukan pengeluaran yang akan menjadi investasi dalam pembangunan manusia. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia seperti indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mendapat biaya yang didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran dari pemerintah. Anggaran yang dibagikan untuk bidang memperlihatkan komitmen pemerintah adanya permasalahan pada bidang tersebut untuk modal dalam pembangunan sebuah daerah. Masa reformasi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yaitu dengan ditetapkannya sistem otonomi daerah berdasarkan TAP MPR Nomor XV/MPR/1988 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang akhirnya menjadi landasan oleh lahirnya beberapa Undang-undang yang berkaitan seperti UU Nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah pusat memberikan wewenang lebih kepada Kepala Daerah untuk mengatur daerah yang dipimpinnya. Proses Penyerahan dan penggantian biaya sarana, prasarana dan sumber daya manusia terhadap daerah.

(Aquariansyah, 2018) menyatakan bahwa kebijakan alokasi APBD semuanya dikontribusikan oleh pemerintah daerah usai pemberlakuan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini memiliki tujuan sebagai upaya membangun dan memajukan suatu daerah berbagai sektor dengan optimal. Sejak ditetapkannya UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memiliki kontribusi yang semakin besar dalam pembangunan di daerahnya. Shah, 1997 dalam Putra, 2019 meyakini konsep otonomi daerah dapat memecahkan berbagai persoalan rakyat terutama di daerah-daerah yang sulit ditangkap oleh pemerintah pusat. Maka dengan adanya otonomi daerah atau desentralisasi fiskal ini,

harapan pemerintah pusat yang memberikan penyerahan wewenang lebih kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah dianggap lebih peka terhadap permasalahan dan solutif sekaligus lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat daerahnya sehingga dapat membuat pembangunan nasional menjadi merata dan mencegah permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi pada setiap daerah.



Sumber: BPK RI, diolah

Gambar 1.3 pengeluaran perkapita (dalam Rp juta)

Pengeluaran perkapita provinsi papua dan provinsi papua barat meningkat dari Rp. 6,25 juta dan Rp. 6,68 juta di tahun 2010 menjadi Rp. 7,16 juta dan Rp. 7,82 pada tahun 2018. Pengeluaran perkapita kedua provinsi tersebut masih berada di bawah pengeluaran perkapita nasional yaitu Rp. 9,44 juta pada tahun 2010 dan Rp. 11.06 juta pada tahun 2018.

Dalam suatu pemerintahan negara, jumlah penduduk menjadi hal yang dapat mempengaruhi indikator yang berkaitan dengan kemakmuran. Dikatakan demikian karena jumlah penduduk merupakan bonus demografi dimana akan tersedia banyak tenaga kerja dalam suatu negara. Dengan demikian hal semacam ini juga akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusianya.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar 3.322.526 jiwa dan Provinsi Papua Barat berjumlah 937.458 jiwa.

Berdasarkan uraian diatas sehingga penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan daerah hasil pemekaran Provinsi Papua. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Peningkatan Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan manusia sebagai modal utama dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pemerintah daerah dengan kewenangannya yang besar di era otonomi saat ini harus mampu mendayagunakan alokasi untuk kesejahteraan masyarakat. Melihat fenomena pencapaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah realisasi pengeluaran urusan pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan indeks pendidikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ?
2. Apakah realisasi pengeluaran urusan kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan indeks kesehatan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat?
3. Apakah realisasi pengeluaran urusan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan indeks daya beli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh realisasi pengeluaran pendidikan terhadap peningkatan Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2. Untuk menganalisis pengaruh realisasi pengeluaran kesehatan terhadap peningkatan Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh realisasi pengeluaran ekonomi terhadap peningkatan Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menambah pengetahuan ilmu ekonomi khususnya tentang pengeluaran dan penerimaan daerah serta hubungannya dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Manfaat praktis hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagi institusi sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan daerah.